

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Definisi Inflasi

Inflasi (*Inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001: 241). Venieris dan Sebold (1978: 603), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum (*general price level*) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Dari definisi di atas, setidaknya ada tiga hal penting yang ditekankan, yaitu:

- a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
- b. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
- c. Bahwa tingkat harga umum yang dimaksud di sini adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

Berkaitan dengan pengertian inflasi ini, perlu pula diketahui tingkat inflasi (*inflation rate*). Tingkat inflasi, yaitu persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 1997: 302), biasanya digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang, inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang mencapai 2-4% , biasanya tidak dapat dielakkan. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama. Seringkali inflasi yang lebih serius atau dinamakan inflasi yang berlari (*galloping inflation*), yaitu yang tingkatnya mencapai 5-10% atau sedikit lebih tinggi akan berlaku. Ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*). Pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu tingkatnya dapat mencapai lebih dari 100% bahkan seribu persen. Kenaikan harga-harga seperti ini dinamakan *hyperinflation* (inflasi tinggi), seperti yang dialami Indonesia di zaman Orde Lama dan Jerman sesudah PD I. Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat akibatnya harga naik secara terakselerasi.

2. 2. Indikator Inflasi

Ada tiga indeks harga yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu (Nanga, 2001: 242):

- a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau CPI). Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang-barang dan jasa-jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, pendidikan dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relative dalam anggaran pengeluaran konsumen. Dalam kasus IHK ini, indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan.
- b. Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index* atau PPI). Indeks harga produsen atau disingkat IHP adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (*raw materials*), produk antara (*intermediate products*) dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Jadi PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau setengah jadi saja, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan di dalam perhitungan. Indeks harga produsen dimaksudkan untuk mengukur harga-harga pada tahap paling dini dari sistem distribusi, yang disusun dari harga-harga pada tingkat transaksi perdagangan pertama kalinya terjadi (Dornbusch and Fischer, 1994: 37).

- c. **PDB Deflator.** PDB deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*). Oleh karena itu, GNP riil juga sering disebut GNP berdasarkan harga tahun dasar (*GNP at base year price*). Sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung, berdasarkan harga pasar yang berlaku (*GNP at current market prices*). Jadi, singkatnya GNP deflator adalah merupakan suatu ukuran tentang tingkat harga (Parkin and Bade, 1992: 53). Karena GNP deflator ini cakupannya lebih luas dalam arti perhitungannya meliputi semua barang yang diproduksi di dalam perekonomian, maka indeks ini merupakan indeks harga yang secara luas digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.

2.3. Jenis Inflasi

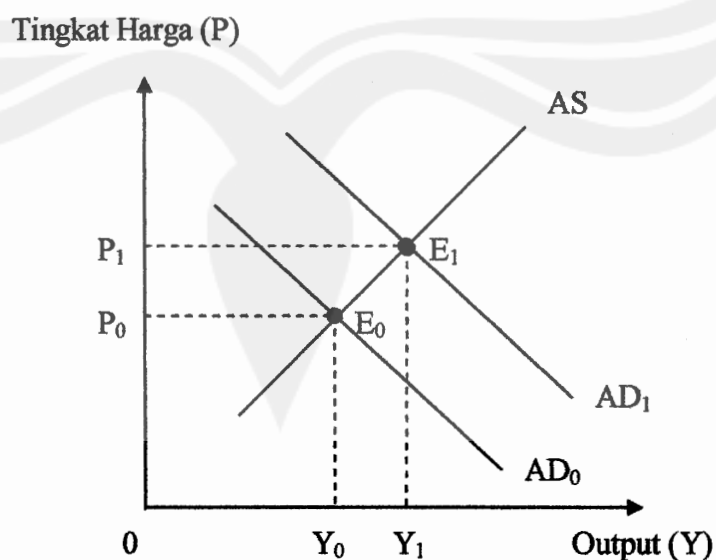
Dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Nanga, 2001: 249):

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*demand-pull inflation*)

Inflasi tarikan permintaan atau disebut juga inflasi sisi permintaan (*demand-side inflation*) atau inflasi karena guncangan permintaan (*demand-shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Barang-barang menjadi berkurang dikarenakan

pemanfaatan sumber-sumber daya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya untuk mengimbangi permintaan yang semakin meningkat atau bertambah. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan harga umum terjadi sebagai akibat terdapatnya permintaan yang berlebih (*excess demand*) untuk barang dan jasa oleh konsumen dan investor sehingga melebihi kapasitas potensial dalam ekonomi. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku di dalam masa perang atau ketidakstabilan politik. Dalam periode seperti itu biasanya pemerintah berbelanja jauh melebihi pendapatannya yang didapat dari pajak atau sumber lain. Oleh sebab itu pemerintah harus mencetak uang dan menyebabkan jumlah uang beredar meningkat akibatnya berlaku inflasi tarikan permintaan. Secara grafik, *demand-pull inflation* dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Inflasi Tarikan Permintaan



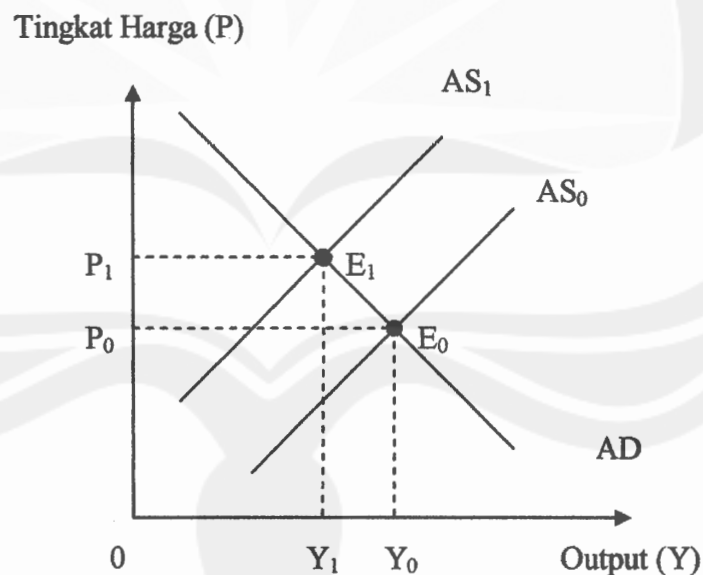
Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa perekonomian mula-mula berada pada titik E_0 . Dengan kenaikan permintaan agregat (AD) dari AD_0 ke AD_1 , yang menyebabkan tingkat harga naik dari P_0 ke P_1 dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat (AS) dari titik E_0 ke E_1 sehingga akan meningkatkan output dalam jangka pendek.

b. Inflasi Dorongan Biaya (*cost-push inflation*)

Inflasi dorongan biaya atau sering disebut juga inflasi sisi penawaran (*supply-side inflation*) atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply-shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa mereka ke pasar. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksikannya. Dengan perkataan lain, inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi atau pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumber daya mengalami kenaikan atau dinaikkan. Apabila biaya produksi mengalami kenaikan, penawaran agregat akan meningkat. Perubahan ini akan menaikkan tingkat harga, tetapi menurunkan produksi nasional. Dengan demikian kenaikan biaya produksi dalam perekonomian akan menimbulkan dua akibat buruk: inflasi berlaku dan tingkat produksi nasional maupun kesempatan kerja akan merosot. Peristiwa ekonomi seperti ini dinamakan *stagflasi*, yaitu stagnasi dalam perekonomian yang dibarengi

oleh inflasi (Sukirno, 1997: 305). Masalah seperti ini dialami oleh perekonomian dunia dalam tahun 1970an. Pada tahun 1973 harga minyak yang diekspor negara-negara Arab mengalami kenaikan sebanyak 3 kali lipat. Negara-negara industri seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat adalah pengimpor minyak terbesar. Kenaikan harga minyak menaikkan biaya produksi berbagai industri dan mendorong kepada berlakunya inflasi desakan biaya yang serius yang diikuti pula oleh kemerosotan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Secara grafik, *supply-side inflation* dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Inflasi Dorongan Biaya



Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula berada dititik E_0 . Kemudian dengan adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser sepanjang kurva permintaan agregat (AD), yaitu dari AS_0 ke AS_1 , telah mendorong perekonomian bergerak

dari titik E_0 ke titik E_1 . Akibatnya, harga naik dari P_0 ke P_1 dan sebaliknya output turun dari Y_0 ke Y_1 .

2. 4. Dampak Inflasi

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat yang dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut (Sukirno, 1997: 307):

1. Akibat buruknya kepada perekonomian, dan
2. Akibatnya kepada individu-individu dan masyarakat

2.4.1. Akibat Buruk Kepada Perekonomian

Sebahagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa datang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi menjadi lebih serius keadaannya, perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. Pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih dahulu ekonomi harus distabilkan, dan ini termasuk usaha menstabilkan harga-harga, sebelum pertumbuhan ekonomi yang pasti dapat diwujudkan.

Ketiadaan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius disebabkan oleh beberapa faktor penting seperti diuraikan di bawah ini:

a. Inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif

Pada masa inflasi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah, tanah dan menyimpan barang yang berharga akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.

b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi

Untuk menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, institusi keuangan akan menaikkan tingkat bunga ke atas pinjaman-pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi, makin tinggi pula tingkat bunga yang akan mereka tentukan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.

c. Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan

Inflasi akan bertambah cepat jalannya apabila tidak dikendalikan. Pada akhirnya inflasi akan menimbulkan ketidakpastian dan arah perkembangan ekonomi tidak lagi dapat diramalkan dengan baik. Keadaan ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

d. Menimbulkan masalah neraca pembayaran

Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu aliran modal keluar akan lebih banyak dari

pada yang masuk ke dalam negeri. Berbagai kecenderungan ini akan memperburuk keadaan neraca pembayaran, defisit neraca pembayaran yang serius mungkin berlaku. Hal ini seterusnya akan menimbulkan kemerosotan nilai mata uang.

2.4.2. Akibat Buruk Bagi Individu dan Masyarakat

Akibat buruk bagi individu dan masyarakat dapat dibedakan kepada tiga aspek seperti yang diterangkan di bawah ini:

a. Memperburuk distribusi pendapatan

Dalam masa inflasi nilai harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik dan pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang adakalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya penduduk yang tidak mempunyai harta (yang meliputi sebahagian besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah) pendapatan riilnya merosot sebagai akibat inflasi. Dengan demikian inflasi melebarkan ketidaksamaan distribusi pendapatan.

b. Pendapatan riil merosot

Sebahagian tenaga kerja di setiap negara terdiri dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi biasanya kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebahagian besar tenaga kerja. Ini berarti kemakmuran masyarakat merosot.

c. Nilai riil tabungan merosot

Dalam perekonomian biasanya masyarakat menyimpan sebahagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nilai

riil tabungan tersebut akan merosot sebagai akibat inflasi. Juga pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya.

2. 5. Teori-Teori Tentang Penyebab Munculnya Inflasi

2.5.1. Teori Kuantitas Uang

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Di dalam menerangkan mengenai teori kuantitas, yang dilakukan oleh **Irving Fisher** digunakan persamaan aljabar yang dinamakan persamaan pertukaran. Persamaan pertukaran tersebut pada umumnya dinyatakan secara berikut (Sukirno, 1997: 221):

$$M.V = P.T$$

di mana:

M = adalah uang beredar (penawaran uang)

V = adalah kecepatan peredaran uang,

P = adalah tingkat harga-harga, dan

T = adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu.

Di dalam persamaan itu M diartikan dalam pengertian uang beredar yang sempit. Ini berarti M adalah sama dengan jumlah uang kertas, logam dan uang giral yang terdapat dalam perekonomian. Kelajuan peredaran uang, yaitu V, ditentukan berdasarkan keseringan (berapa seringnya) uang beredar yang terdapat dalam masyarakat berpindah tangan dalam satu tahun. Apabila setiap jenis uang

secara rata-rata berpindah tangan sebanyak empat kali dalam satu tahun, maka V adalah empat. Dalam menentukan nilai P yang perlu diketahui adalah indeks harga. Di dalam perekonomian terdapat banyak jenis barang dan harganya berbeda-beda pula. Disamping itu dari masa ke masa harga-harga mengalami perubahan yang berbeda. Adalah tidak mungkin untuk menggambarkan semua keadaan ini di dalam persamaan di atas. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keadaan harga-harga dan perubahannya dari tahun ke tahun haruslah digunakan indeks harga, dan perubahan-perubahan dari indeks tersebut.

Faktor yang terakhir dalam persamaan pertukaran di atas, yaitu T , menunjukkan jumlah barang-barang jadi dan barang-barang setengah jadi yang diperjualbelikan.

Untuk menerangkan pandangan dari teori kuantitas ini **Irving Fisher** telah menggunakan persamaan pertukaran yang baru saja diterangkan di atas. Kalau diperhatikan bentuk persamaan pertukaran itu, maka sebenarnya setiap perubahan dalam uang beredar belum tentu akan merubah tingkat harga-harga menurut tingkat (persentase) yang sama. Misalnya apabila M naik tetapi V turun, maka walaupun T tetap, harga-harga tidak akan naik menurut kelajuan yang sama dengan kenaikan M . Atau, apabila M naik dan V adalah tetap tetapi T mengalami kenaikan yang sama tingkatnya dengan M , maka P tidak mengalami perubahan. Dari kedua-dua contoh ini dapatlah disimpulkan bahwa persamaan pertukaran tersebut tidak menunjukkan bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga (Sukirno, 1997: 222). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut (Boediono, 1994: 167):

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar, kejadian seperti misalnya kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan. Keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Ini berarti bahwa tidak akan ada kenaikan permintaan yang berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang (atau harga-harga mungkin naik sedikit sekali). Dalam keadaan seperti ini, kenaikan jumlah uang yang beredar sebesar 10% diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar, misalnya 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung. Keadaan yang kedua adalah di mana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga untuk naik di masa mendatang sebesar laju inflasi di bulan-bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang yang beredar akan sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan permintaan akan barang-barang. Dalam hal ini kenaikan jumlah uang sebesar, misalnya 10% akan diikuti

dengan kenaikan harga barang-barang mungkin sebesar 10% pula. Keadaan seperti ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan orang-orang mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi yang baru. Keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menaik). Dalam keadaan ini kenaikan jumlah uang yang beredar sebesar, misalnya 20% akan mengakibatkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 20%.

2.5.2. Teori Keynes

Teori ini menjelaskan mengenai inflasi yang didasarkan atas teori makro. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi dari teori ini tidak lain adalah proses yang menunjukkan permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (yang disebut dengan *inflationary gap*) (Boediono, 1994: 170). Gap inflasi ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tertentu (mungkin pemerintah) berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan menjalankan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan-golongan tersebut mungkin pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan tersebut bisa pula berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya

melebihi kenaikan produktivitas buruh. Golongan yang dapat memperoleh dana yang lebih banyak bisa memperoleh bagian output yang lebih banyak, sedangkan golongan yang tidak dapat memperoleh dana akan mendapat bagian output yang lebih kecil. Menurut Keynes, proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif total pada harga-harga berlaku, tidak melebihi jumlah output yang tersedia.

2.5.3. Teori Strukturalis

Teori ini merupakan teori inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilitas*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori ini sering disebut sebagai teori inflasi jangka panjang karena dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Menurut teori ini, ada dua ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi (Boediono, 1994: 174).

- a. Ketegaran yang berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh antara lain: dasar penukaran (*terms of trade*) yang semakin memburuk, supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak *responsive* terhadap kenaikan harga. Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Akibatnya, untuk mencapai target

pertumbuhan tertentu, terpaksa melakukan penggalakan produksi dalam negeri yang bersifat sebagai substitusi impor, meskipun ongkos produksinya lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah. Tingginya ongkos produksi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Inflasi akan timbul apabila proses substitusi impor semakin meluas.

- b. Ketegaran yang berupa ketidakelastisan dari penawaran atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan di dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan per kapita sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik melebihi kenaikan harga barang-barang. Akibatnya timbul tuntutan dari para karyawan untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah akan menaikkan ongkos produksi yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang tersebut. Demikian seterusnya sehingga proses saling dorong mendorong atau spiral antara harga dan upah akan terus berlangsung dan tidak berhenti.

Proses inflasi yang timbul karena kedua ketegaran tersebut dalam praktek jelas tidak berdiri sendiri-sendiri. Umumnya kedua proses tersebut saling berkaitan dan seringkali memperkuat satu sama lain. Misalnya, produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak bisa mengikuti kenaikan kebutuhan di dalam negeri akan menimbulkan tekanan untuk mengimpor bahan makanan dan selanjutnya membuat masalah neraca pembayaran semakin parah, dan selanjutnya mendorong proses substitusi impor yang berlebihan, dan selanjutnya kenaikan harga-harga.

2.5.4. Teori Moneter

Model moneter internasional menunjukkan bahwa tingkat inflasi suatu negara sangat tergantung pada inflasi “dunia”. Model standar Post Keynesian memasukkan variabel endogen baik tingkat inflasi dan *balance of payment* maupun otoritas moneter yang menentukan jumlah uang yang beredar.

Teori moneter dari inflasi dunia dan hubungannya dengan *balance of payment* dapat dilihat sebagai berikut (Suryantoro, 2000: 33). Kelebihan pertumbuhan jumlah uang beredar dunia diatas pertumbuhan output dunia telah mengakibatkan terjadinya inflasi dunia dan ini akan mengakibatkan inflasi pada suatu Negara. Pada suatu tingkat inflasi tertentu dan tingkat bunga dan output diasumsikan pada negara kecil, perubahan dalam dasar kredit akan menentukan perubahan *reserve*. Model ini dapat disederhanakan sebagai berikut. Permintaan uang untuk suatu negara adalah:

$$M_d = P \cdot m(y, r) \dots \dots \dots (1)$$

dan persamaan *supply* $M = R + B$, di mana R adalah cadangan internasional dan B adalah dasar kredit domestik (*domestic credit base*). Untuk penyederhanaan, diasumsikan sistem *reserve*-nya 100%. P adalah tingkat harga (GNP deflator), y output riil dan r adalah tingkat suku bunga. Pada kondisi keseimbangan, penawaran sama dengan permintaan.

$$R + B = P \cdot m(y, r) \dots \dots \dots (2)$$

Pada negara kecil untuk pasar kapital, r akan ditetapkan pada tingkat suku bunga dunia. Asumsi Negara kecil untuk pasar barang juga terjadi pada P dan y. Negara kecil tersebut sebagai penerima harga pasar dunia dan dapat menjual semua

barangnya pada tingkat harga tersebut. Dengan P , y dan r tetap pada asumsi negara kecil, perubahan dasar kredit domestik B akan menentukan dalam cadangan internasional.

Model monetaris ini mempunyai dua implikasi empiris. Pertama, inflasi domestik akan *konvergen* dengan tingkat inflasi dunia. Kedua, perubahan reserve akan berpengaruh langsung terhadap dasar kredit domestik (*domestic credit base*).

2. 6. Definisi Variabel-Variabel Bebas

2.6.1. Pengertian Jumlah Uang Beredar (JUB)

Jumlah uang beredar memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Pengertian uang beredar dalam arti sempit adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat.

Uang kartal ialah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang langsung di bawah kekuasaan masyarakat (umum) untuk menggunakannya. Uang kertas atau logam pemerintah (Bank Sentral) yang disimpan di dalam lemari besi bank-bank atau bank sentral sendiri tidak termasuk uang kartal. Sedangkan uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening Koran (giro) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian dari “uang beredar” karena sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemiliknya (masyarakat) untuk kebutuhannya persis seperti halnya uang kartal. Saldo rekening Koran (giro) milik suatu bank pada bank lain bukan uang giral.

Jumlah uang beredar pada suatu saat adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral sehingga secara formula dapat dituliskan sebagai berikut ini (Boediono, 2001: 86):

$$M1 = K + D$$

dimana:

K = uang kartal (*currency*)

D = uang giral (*demand deposit*)

Dalam kepustakaan ekonomi moneter, pengertian tersebut disebut uang beredar dalam arti sempit atau *narrow money*.

Pengertian lain mengenai uang beredar didasarkan atas anggapan bahwa sebenarnya bukan hanya uang tunai dan saldo giro (cek) saja yang bisa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Uang milik masyarakat yang disimpan di Bank dalam bentuk deposito berjangka (*time deposit*) atau tabungan juga mempunyai ciri yang mendekati uang tunai. Kedua simpanan ini bisa diubah tanpa banyak kesulitan menjadi uang tunai untuk pembayaran transaksi tersebut.

Deposito berjangka dan tabungan sering disebut dengan istilah *quasi money* atau *near money*, yaitu sesuatu yang mendekati ciri dari uang. Menurut pengertian yang kedua ini, uang yang beredar adalah *narrow money* ditambah *quasi money*. Secara matematis, diperoleh dengan formula berikut (Boediono, 2001: 86):

$$M2 = K + D + T$$

dimana:

T = saldo deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada bank-bank

Konsep uang beredar ini disebut uang beredar dalam arti luas atau *broad money*.

Secara konsep, kedua jenis uang beredar ini tidak ada yang lebih baik atau lebih unggul. Artinya, hal itu tergantung dari tujuan analisis aspek keadaan yang digambarkan. Jika keadaan normal maka biasanya *narrow money* dan *broad money* berkembang sejalan satu sama lain, sehingga salah satu bisa dipakai untuk menggambarkan keadaan moneter atau untuk melakukan analisis moneter.

Hubungan antara uang beredar dan inflasi dapat dilihat dari keadaan yang pernah dialami di Indonesia pada awal krisis ekonomi pertengahan tahun 1997. Pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang rupiah merosot tajam sehingga dapat dikatakan orang enggan memegang deposito berjangka. Masyarakat lebih suka memegang uang tunai atau giro yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan barang sehingga terhindar dari kerugian yang ditimbulkan karena kemerosotan nilai uang (deflasi). Dalam hal ini *broad money* akan berkembang lebih lambat dari pada *narrow money*. Sebaliknya, apabila kepercayaan masyarakat akan nilai mata uang pulih atau semakin menguat maka *broad money* biasanya berkembang lebih cepat dari *narrow money* (Boediono, 2001: 88).

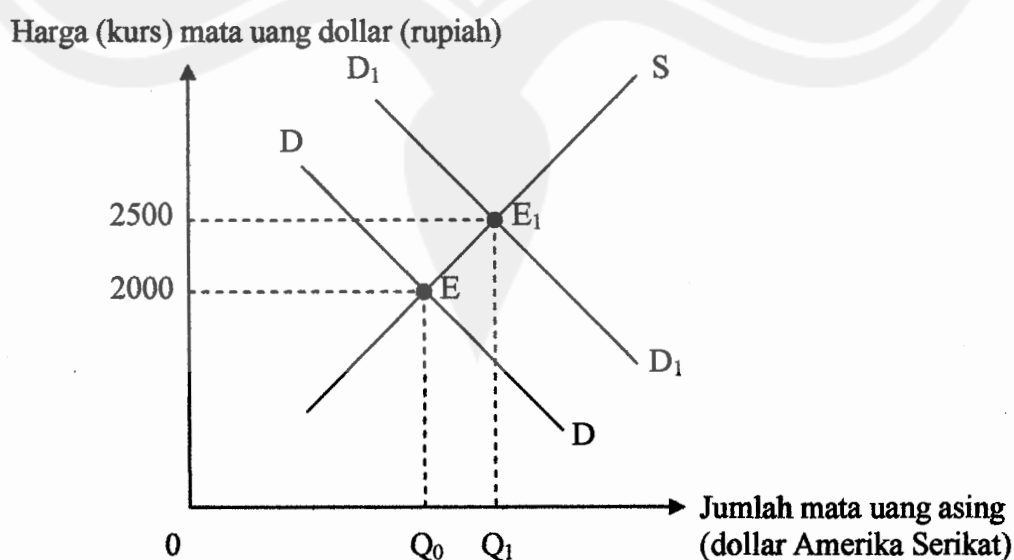
2.6.2. Kurs Valuta Asing

Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering

disebut dengan kurs (*exchange rate*). Misalnya, kurs valuta asing (dollar Amerika Serikat) adalah $\text{US\$} = \text{Rp}678$ berarti bahwa Rp678 dapat ditukar dengan dollar sebanyak US\$ 1 atau sama saja Rp 1 dapat ditukar dengan US\$ $1/678$. Dalam kenyataannya, sering terdapat berbagai tingkat kurs untuk satu valuta asing.

Di dalam pasar dari suatu barang, harga ditentukan pada keadaan di mana penawaran dan permintaan barang mencapai keseimbangan, yaitu jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Dalam pasar valuta asing, harga atau kurs valuta asing juga ditentukan secara demikian. Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terus menerus tersebut akan berlaku disebabkan oleh perubahan yang selalu terjadi ke atas permintaan atau penawaran valuta asing. Untuk menunjukkan akibat yang mungkin timbul dari perubahan-perubahan seperti itu, pada gambar 2.3 ditunjukkan akibat dari kenaikan permintaan ke atas valuta asing.

Gambar 2.3
Perubahan Kurs Valuta Asing



Pada grafik di atas dimisalkan bahwa permintaan penduduk Indonesia ke atas dollar bertambah dari DD menjadi D_1D_1 . Kenaikan permintaan ke atas mata uang dollar ini menyebabkan kenaikan nilai dollar dan kemerosotan nilai rupiah. Ini berarti kenaikan dalam permintaan itu menyebabkan penduduk Indonesia harus membayar lebih mahal untuk setiap dollar yang ingin diperolehnya. Pada mulanya pemilik rupiah harus membayar Rp2.000 untuk memperoleh setiap dollar. Sekarang mereka harus membayar Rp2.500 untuk setiap dollar. Oleh karena sifatnya yang selalu mengalami perubahan tersebut, kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar dinamakan **kurs pertukaran yang berubah bebas** atau **kurs pertukaran mengambang** (Sukirno, 1997: 362).

Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas dari pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah di dalam batas yang kecil meskipun batas-batas ini dapat diubah-ubah dari waktu ke waktu. Berikut ini akan diuraikan sistem-sistem kurs valuta asing yang diterapkan di negara maju bahkan negara terbelakang (Nopirin, 1996: 147).

a. Sistem kurs yang berubah-ubah

Di dalam pasar bebas, perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran ke luar negeri (impor). Permintaan valuta asing diturunkan dari transaksi debit dalam neraca

pembayaran internasional. Sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir yang berasal dari transaksi kredit neraca pembayaran internasional. Makin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan (relatif terhadap negara lain), makin besar kemungkinan untuk mengimpor yang berarti makin besar pula permintaan akan valuta asing. Kurs valuta asing cenderung naik (harga mata uang sendiri turun). Demikian juga inflasi, akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun yang akan mengakibatkan kurs valuta asing naik (Nopirin, 1996: 149).

b. Sistem kurs yang stabil

Sistem kurs bebas seperti tersebut diatas sering menimbulkan adanya tindakan spekulasi sebagai akibat ketidakpastian di dalam valuta asing. Oleh karena itu banyak negara yang kemudian menjalankan suatu kebijaksanaan untuk menstabilkan kurs. Pada dasarnya kurs yang stabil dapat timbul secara aktif dan pasif. Kurs yang stabil secara aktif dapat terjadi karena pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs (*stabilization funds*), sedangkan kurs akan stabil secara pasif apabila di dalam suatu negara menggunakan sistem standar emas (Nopirin, 1996: 152).

2.6.3. Defisit Anggaran

Saldo anggaran adalah selisih antara penerimaan total pemerintah dan pengeluaran total pemerintah, atau sama dengan pajak neto dikurangi pembelian pemerintah, $T - G$. Jika penerimaan melampaui pengeluaran, pemerintah mengalami surplus anggaran. Jika pengeluaran melampaui penerimaan, seperti yang terjadi selama beberapa dasawarsa, pemerintah mengalami defisit anggaran (Lipsey... et al. 1995).

Defisit anggaran akan mengakibatkan penawaran akan uang bertambah. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah menaikkan anggarannya maka dapat dipenuhi dari 3 alternatif yaitu : (a) pajak, (b) pinjaman luar negeri, (c) pencetakan uang (*printing money*). Jika dalam masyarakat tidak berlaku “*aliran Ricardian*” berarti defisit bersumber dari pemotongan pajak maka berarti akan menurunkan tabungan nasional, menaikkan permintaan agregat (AD) dan akhirnya menaikkan tingkat harga (*price level*). Jadi defisit yang bersumber dari ekspansi kebijakan fiskal akan berhubungan dengan inflasi jika (a) dan (b) tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah membiayai defisit dengan melalui mencetak uang maka akan terjadi inflasi terus menerus. Penerimaan pemerintah dari mencetak uang dikenal sebagai *seignorage*. Biasanya *seignorage* dilakukan dengan prosedur tidak langsung di mana pemerintah mengeluarkan obligasi dan menjualnya tetapi tidak langsung ke publik. Pemerintah meminta bank sentral untuk membeli obligasi ini dan berarti bank sentral akan mencetak uang baru.

Besarnya pertumbuhan tingkat harga (inflasi) setara dengan besarnya pertumbuhan uang, sehingga :

$$\pi = \frac{\Delta M}{M}$$

$$\Delta M = \pi M$$

Penerimaan *seignorage* riil (*real seignorage revenue*; R) adalah sebesar uang baru yang dicetak; itu berarti sebesar penerimaan *seignorage* nominal; ΔM ; dibagi tingkat harga (P). Jika persamaan di atas dibagi dengan P maka didapat:

$$R = \frac{\Delta M}{P} = \frac{\pi M}{P}$$

Persamaan di atas menunjukkan penerimaan seignorage riil sama dengan inflasi dikali penawaran uang riil (M/P). Persamaan terakhir ini sering disebut sebagai: *inflation tax* (Dalam kasus pajak, penerimaan pajak adalah tarif pajak dikalikan basis atau dasar pajak sedangkan kasus *inflation tax* maka tarif pajaknya adalah tingkat inflasi dan basisnya adalah penawaran uang riil). Pemerintah menerima *inflation tax* dengan jalan mencetak uang lalu membelanjakan untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan yang membayar pajak adalah semua anggota masyarakat yang memegang uang karena inflasi menurunkan daya beli.

Kenaikan penawaran uang dapat menyebabkan *seignorage* jika terjadi kenaikan inflasi. Jika tingkat bunga riil tetap maka akan menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal; selanjutnya akan menurunkan jumlah uang yang dipegang. Jadi sangat tergantung mana yang lebih besar, naiknya inflasi atau turunnya permintaan uang riil. Jika penawaran uang meningkat mengakibatkan inflasi, dan selanjutnya menaikkan tingkat suku bunga, maka permintaan uang riil akan meningkat.